



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pariwisata pada saat ini telah mengalami berbagai perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan yang menyebabkan perkembangannya semakin pesat. Perkembangan pariwisata dinilai sangat penting oleh banyak daerah karena sektor ini dapat memberikan berbagai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sebagai salah satu pendorong laju pembangunan, kepariwisataan diarahkan pada dua sasaran yaitu sasaran sosio ekonomi serta sasaran sosio budaya. Dalam sasaran sosio ekonomi, pariwisata berfungsi sebagai sumber penerimaan devisa, sumber peningkatan atau pemerataan ekonomi masyarakat, dan juga sumber perluasan lapangan pekerjaan sedangkan dalam sasaran sosio-budaya, pariwisata dapat berfungsi sebagai pendorong terpeliharanya kearifan lokal yang terdapat di suatu destinasi wisata baik yang bersifat material maupun non material sehingga terdapat kaitan yang erat antara usaha pengembangan kepariwisataan.

Bertolak belakang dengan nilai-nilai positif di atas, pengembangan pariwisata yang tidak terarah dapat pula menjadi penyebab hal-hal yang negatif seperti penurunan nilai moral masyarakat, perpindahan tenaga kerja dari sektor-sektor ekonomi lainnya, polusi, kemacetan lalu lintas, sampah, hilangnya keaslian budaya setempat dan kerusakan lingkungan dari kawasan-kawasan alami. Mengacu kepada dampak-dampak positif dan negatif dari kegiatan pariwisata, pengembangan sektor tersebut harus dilaksanakan dengan sistem pengelolaan yang baik mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Pengembangan pariwisata yang berbasis pada lingkungan tentunya harus dilandaskan kepada tujuan untuk melestarikan lingkungan tersebut dan mempertahankan daya tarik wisatanya.

Provinsi Banten sebagai gerbang barat Pulau Jawa memiliki potensi pariwisata yang tidak terbantahkan. Berbagai Obyek dan Daya Tarik Wisata yang tersebar hampir diseluruh wilayah kabupaten dan kota sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan penggerak roda perekonomian daerah. Dalam hal ini, Pemerintah



Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan kepariwisataan di Provinsi Banten.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten terus berusaha untuk mengembangkan dan mempromosikan semua obyek wisata yang berada di wilayah Provinsi Banten. Salah satu upaya konkret yang akan dikedepankan yaitu dengan menciptakan ikon-ikon destinasi pariwisata daerah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis provinsi Banten. Penetapan kawasan strategis pariwisata ini secara garis besar akan dititikberatkan pada empat pilar pariwisata yaitu: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

Berdasarkan fakta diatas, Dinas Pariwisata Provinsi Banten akan melaksanakan tahap awal dari pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud diatas dengan melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultansi Identifikasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi. Kegiatan ini akan menjadi landasan dalam roadmap pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten.

1.2 Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini diantaranya yaitu :

1. Tersusunnya *roadmap* pengembangan kawasan strategis pariwisata
2. Tersusunnya identifikasi dan zonasi obyek wisata unggulan
3. Ditetapkannya norma, standar dan pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata berdasarkan pilar pembangunan kepariwisataan

1.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang harus dicapai adalah tersedianya dokumen yang merupakan inventarisasi dari seluruh obyek wisata unggulan di Provinsi Banten untuk kemudian dapat dikelompokkan sebagai kawasan strategis Pariwisata tingkat Provinsi.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Materi

Penyusunan identifikasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten mencakup materi tentang :

1. Tahapan/*roadmap* pengembangan kawasan strategis pariwisata
2. Identifikasi dan zonasi obyek wisata unggulan
3. Penetapan norma, standar dan pedoman pengembangan kawasan strategis pariwisata berdasarkan pilar pembangunan kepariwisataan

1.3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Sementara itu, lingkup kegiatan Identifikasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten akan dikaitkan dengan output yang akan dihasilkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tahap inisiasi



Dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Koordinasi dengan pihak pemberi tugas dan pengurusan administrasi survey;
- Mobilisasi personil;
- Penetapan jadwal rencana kerja rinci;
- Asistensi instrumen penelitian (survey)
- Pelaksanaan kegiatan survey lapangan (pengumpulan data) primer dan sekunder.

b. Tahap pengumpulan data

Tahapan kegiatan ini merupakan tahapan pengumpulan data primer dan sekunder terkait obyek dan daya tarik wisata unggulan di Provinsi Banten.

c. Tahap analisis

Dalam tahapan kegiatan ini dilakukan analisis, identifikasi dan pembobotan terhadap masing-masing obyek dan daya tarik wisata unggulan ditinjau dari 4 aspek pengembangan destinasi pariwisata, yaitu:

- *Attraction*
Attraction atau atraksi adalah produk utama sebuah destinasi. Atraksi berkaitan dengan *what to see* dan *what to do*. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan.
- *Amenity*
Amenity atau amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenitas berkaitan dengan ketersediaan sarana akomodasi untuk menginap serta restoran toilet umum, *rest area*, tempat parkir, klinik kesehatan, sarana ibadah dan fasilitas lainnya.
- *Accessibility*
Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Akses jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan merupakan aspek penting bagi sebuah destinasi.
- *Ancillary*
Ancillary berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut.

d. Tahap perumusan strategi dan rekomendasi

Dari hasil analisis terhadap aspek-aspek yang telah ditentukan, selanjutnya akan dirumuskan strategi perencanaan yang akan diaplikasikan. hal ini akan mengerucut kepada obyek dan daya tarik wisata unggulan yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten.

1.4 Keluaran

Mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup yang telah dirumuskan, maka keluaran yang diharapkan dari Pekerjaan ini adalah tersusunnya rekomendasi terhadap obyek dan daya tarik wisata unggulan yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi untuk dijadikan referensi bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektor kepariwisataan.



1.5 Dasar Hukum

1.5.1 Undang-undang

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1.5.2 Kelompok Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
13. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);



14. Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75).
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia.
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

1.5.3 Kelompok Peraturan Daerah

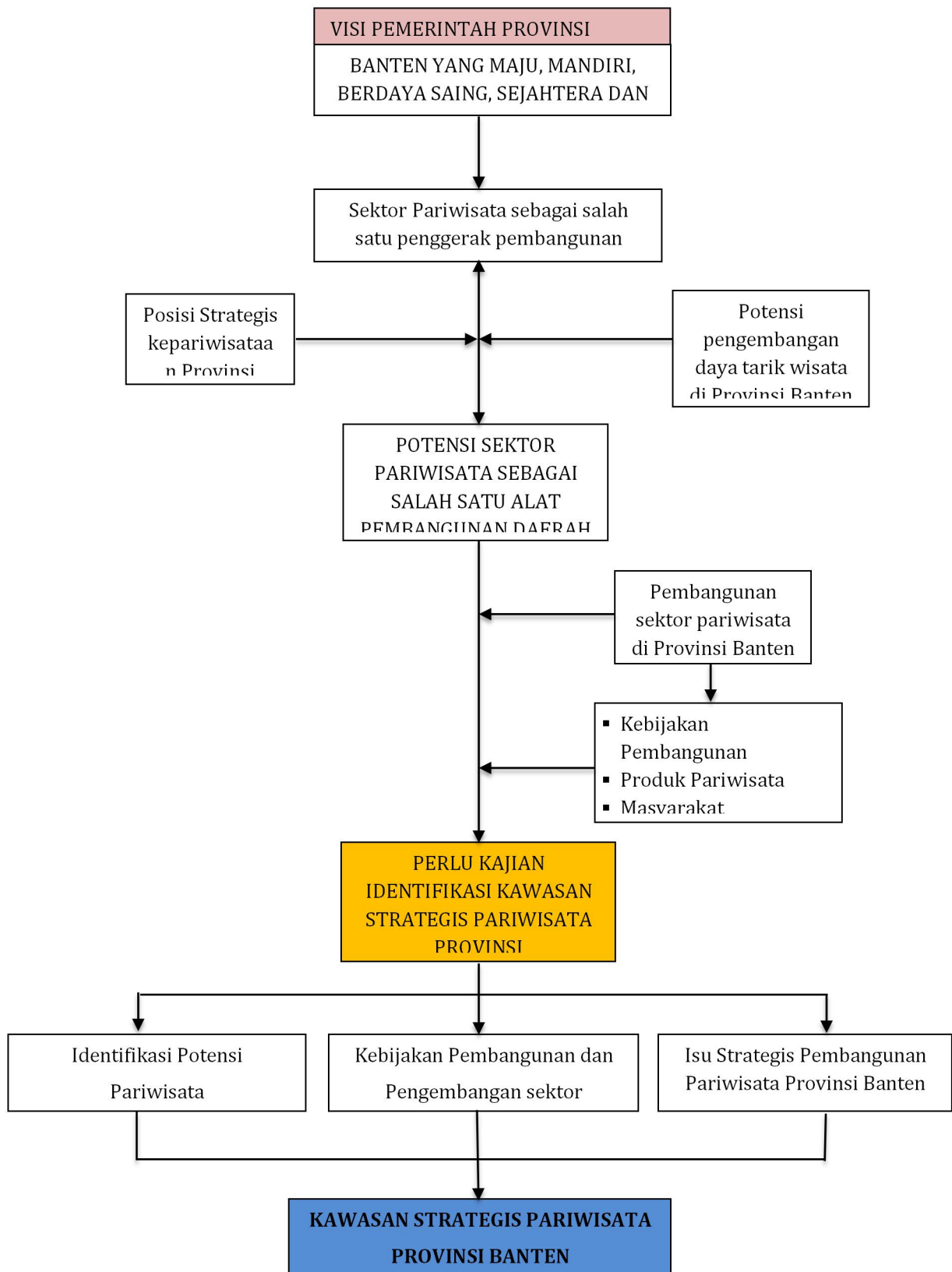
1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2011-2015;

1.5.4 Dokumen terkait Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Banten;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
3. RPJMD dan RPJPD Provinsi Banten.

1.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Pekerjaan Penyusunan Identifikasi Kawasan Pariwisata Provinsi, Provinsi Banten



1.7 Metodi Studi

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Langkah awal yang dilakukan dalam melakukan strategi pengembangan pariwisata adalah kegiatan pengumpulan data. Penyusunan basis data, mencakup pengumpulan (*collecting*) dan kompilasi data-data, misalnya untuk mengetahui jumlah kegiatan yang telah/ pernah dilakukan, tipologi dan karakteristik serta data-data lain yang terkait. Metode pengumpulan data terdiri dari 2 (dua), yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data primer meliputi :

a. Observasi

Observasi merupakan peninjauan yang dilakukan dengan mengamati daerah objek penelitian langsung secara cermat. Dengan menggunakan metode ini dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai wilayah studi serta memperoleh data dan subjek secara langsung, baik dengan komunikasi verbal ataupun tidak, yang berguna sebagai masukan/data tambahan untuk pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan rencana.

b. Survei

Survei merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berasal dari narasumber/komunitas untuk memperoleh data-data yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam metode ini adalah wawancara (*interview*) dan kuesioner (*questionnaires*).

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden atau narasumber. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang dianggap memahami isu pengembangan kawasan dan kepariwisataan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang permasalahan dan aspirasi yang muncul terkait dengan pengembangan kawasan dan kepariwisataan. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang kemungkinan jika dilakukan dengan kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. Teknik ini dapat dilakukan dengan melalui tatap muka dan melalui telepon.

d. Kuesioner (Angket)

Teknik ini dilakukan dengan memberikan tanggungjawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan secara tertulis.

Jenis angket ada 2 (dua) yaitu : tertutup dan terbuka. Jenis angket tertutup mempunyai bentuk-bentuk pertanyaan (ya-tidak, pilihan ganda, skala penilaian, dan daftar cek). Sedangkan jenis angket terbuka mempunyai bentuk pertanyaan jawaban singkat atau uraian singkat (bentuk isian).

Sedangkan metode pengumpulan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber instansi dan literatur seperti media cetak dan elektronik. Data sekunder dapat berupa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dokumen rencana, kumpulan data statistik, artikel sejarah dan budaya, kependudukan, kondisi fisik dan lingkungan, kepemilikan lahan, prasarana dan fasilitas serta peta wilayah kawasan dan sekitarnya.

1.7.2 Metode Analisis

Secara umum, metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kuantitatif menggunakan prosedur yang terukur dan sistematis yang didukung oleh data-data numerik, pendekatan kuantitatif ini digunakan terutama didalam kajian tentang pengembangan pasar wisatawan dan infrastruktur pariwisata. Metode analisis kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (*intangibile*). Pendekatan kualitatif akan diterapkan dalam kajian tentang kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan pariwisata, analisis potensi dan permasalahan kawasan, isu-isu strategis kawasan, konsep pengembangan kawasan, dan strategi pengembangan kawasan. Berikut ini adalah gambaran singkat dari beberapa metode analisis yang dilakukan.

a. Analisis Deskriptif

Metoda penelitian ini melakukan penuturan, analisis dan mengklasifikasikan data dan informasi yang diperoleh dengan berbagai teknik seperti survey, wawancara, observasi, angket, kuesioner, studi kasus, dan lain-lain (Surakhmad, 1980). Dalam hal ini, metoda deskriptif analitis ini akan lebih difokuskan kepada analisis kondisi eksisting, yang meliputi analisis proses dan mekanisme dalam pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan hingga saat ini.

b. Analisis Spasial

Metoda ini menjadikan peta sebagai model yang merepresentasikan dunia nyata yang diwakilinya, sebagai suatu media analisis guna mendapatkan hasil-hasil analisis yang memiliki atribut keruangan. Analisis spasial ini penting untuk mendapatkan gambaran keterkaitan di dalam permasalahan antar-wilayah atau kawasan dalam wilayah penelitian.

c. Analisis *Supply* dan *Demand* Kepariwisataan

Metode analisis ini digunakan untuk mengkaji 2 (dua) komponen pokok kepariwisataan. Menurut Sunaryo, 2013 terdapat 2 (dua) komponen pokok kepariwisataan yaitu sisi komponen produk wisata (*tourism supply side*) dan sisi komponen pasar pariwisata (*tourism demand side*). Dari sisi *supply* didalam sistem destinasi pariwisata terdiri atas beberapa komponen pokok yang dianalisis, yaitu daya tarik wisata, akomodasi, aksesibilitas dan transportasi, fasilitas umum, fasilitas pendukung pariwisata dan masyarakat didalam destinasi pariwisata di Provinsi Banten. Dari sisi *demand* kepariwisataan, komponen yang dianalisis adalah pasar wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung ke dalam kawasan penelitian baik karakteristik maupun tingkat dan pola kegiatan wisatawan.

d. Analisis Kelembagaan

Metode ini digunakan untuk memahami tugas dan fungsi dari dikembangkannya suatu organisasi dengan struktur dan perangkat-perangkat organisasinya. Oleh karena itu metoda analisis ini difokuskan untuk menganalisis lembaga-lembaga yang terkait (pemerintah, swasta/yayasan, perorangan) dalam proses pengembangan destinasi dan proses pengelolaan destinasi pariwisata.

e. Matriks Penilaian

Matriks penilaian digunakan sebagai alat dalam menilai kelayakan suatu destinasi pariwisata menjadi destinasi pariwisata unggulan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk masing-masing kriteria dirumuskan tolok ukurnya. Peneliti kemudian akan memberikan penilaian/skor terhadap tolok ukur yang ditetapkan, disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Skor dari setiap tolok ukur inilah yang akan menunjukkan peringkat dari kawasan pariwisata yang akan menjadi prioritas

pengembangan. Matriks penilaian destinasi pariwisata unggulan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I.1
Contoh Matriks Penilaian Daya Tarik Wisata

No	DTW	Analisis Pengembangan																Skor Total
		Atraksi					Aksesibilitas			Amenitas			Kelembagaan					
		1	2	3	4	5	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4		

Sumber: Fandeli, 2002

Tabel I.2
Kelas Potensi Daya Tarik Wisata

No.	Jumlah	Pembagian Kelas Potensi
1	> 34	Tinggi
2	33-34	Sedang
3	< 33	Rendah

Sumber: Fandeli, 2002

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Laporan Akhir Identifikasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, keluaran, dasar hukum, kerangka pemikiran kegiatan, metode studi, serta sistematika pembahasan laporan.

BAB 2 TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang dipakai dalam mendukung penyelesaian pekerjaan ini serta gambaran umum kebijakan pembangunan daerah serta pariwisata di Provinsi Banten.

BAB 3 GAMBARAN UMUM KEPARIWISATAAN PROVINSI BANTEN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai gambaran umum kebijakan Provinsi Banten, gambaran umum Provinsi Banten serta posisi pariwisata Provinsi Banten.

BAB 4 ANALISIS

Berisikan mengenai analisis terhadap isu-isu strategis terkait dengan pembangunan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi.



BAB 5 REKOMENDASI & ROADMAP PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Berisikan mengenai rekomendasi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten sebagai hasil dari analisis penilaian potensi daya tarik wisata unggulan di Provinsi Banten dan *roadmap* pengembangannya.